

## **BAB 4**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Jawa Timur pada tanggal 19 - 20 Juni 2023 dapat disimpulkan bahwa:

1. Calon apoteker telah memperoleh wawasan, keterampilan, pengetahuan dan pengalaman praktis dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Dinas Kesehatan.
2. Calon apoteker telah mempelajari serta mengetahui gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian dalam Dinas Kesehatan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Jawa Timur pada tanggal 19 - 20 Juni 2023 dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon Apoteker lebih mempersiapkan diri dengan meningkatkan pemahaman mengenai agar dapat melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan baik.
2. Mahasiswa calon Apoteker lebih aktif lagi dalam menggali informasi kepada narasumber

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta: Indonesia.
- Badan Pengawas Oban dan Makanan RI. 2019<sup>a</sup>, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Badan Pengawas Oban dan Makanan RI. 2019<sup>b</sup>, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2020, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Cara Distribusi Obat yang Baik*, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta: Indonesia.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 2021, *Peraturan BPOM No. 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 2022<sup>a</sup>, *Peraturan BPOM No. 2 tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

- Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 2022<sup>b</sup>, *Peraturan BPOM No. 21 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajual Notifikasi Kosmetika*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan RI. 2007, *Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah Kepulauan*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan RI, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan*. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta: Indonesia.
- Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Departemen Kesehatan Indonesia. 2007, *Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Daerah Perbatasan*, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Departemen Kesehatan Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian. 2010. *Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit*. Jakarta: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Gubernur Jawa Timur. 2016, *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas*

*dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*;  
Jawa Timur: Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur. 2021, *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*;  
Jawa Timur: Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Kemenkes RI, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan*.  
Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kemenkes RI. 2011, *Modul Penggunaan Obat Rasional*, Jakarta:  
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kemenkes RI, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pemasukan Alat Kesehatan melalui Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Scheme)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kemenkes RI. 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Jakarta: Indonesia.

Kemenkes RI, 2019, *Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Pengendalian Persediaan Obat di Rumah Sakit*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kemenkes RI, 2022, *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika*.  
Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kemenkes RI, 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*. Jakarta: Indonesia.

- Menkes RI. 2008, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1121/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman. Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Menkes RI. 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika*, Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menkes RI. 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional*, Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menkes RI. 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional*, Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menkes RI. 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Menkes RI, 2016<sup>a</sup>, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI, 2016<sup>b</sup>, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menkes RI. 2019, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/817/2019 tentang Formularium Nasional*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Menkes RI. 2022, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1970/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6485/2021 Tentang Formularium Nasional*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Menkes RI. 2023, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Prikotropika dan Prekursor Farmasi*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Hukum dan HAM RI. 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2023, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Permenkes RI, 2010, *PMK RI No 1191 Tahun 2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan*, Jakarta: Menteri Kesehatan RI.
- Permenkes RI, 2021, *PMK RI No 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Jakarta, Menteri Kesehatan RI.
- Permenkes RI, 2021, *PMK RI No 34 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik*, Jakarta, Menteri Kesehatan RI.

- Presiden RI. 1999, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, 1999. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Indonesia.
- Presiden RI. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden RI. 2012, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*, Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden RI. 2021, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Presiden RI. 2022. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Indonesia.
- Saputera, M.M.A., Sari, A.K., Ariani, N. dan Mulyani, A. 2022. Evaluasi Sistem Penyimpanan Obat di UPT Instalasi Farmasi Kabupaten Banjarmasin, *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 5(1): 66-75.
- Setiawan, Z. I. dan Rusdiansyah. 2016, Peranan Bauran Harga Terhadap Peningkatan Penjualan Alat Kesehatan, *Jurnal Pilar Nusa Mandiri* **12(2)**: 211-218.
- Sulistiyorini, 2016, Perencanaan Obat dengan Menggunakan Metode Konsumsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 7(3): 112-120.
- World Health Organization Drug Information*, 2019. *Good Storage and Distribution Practices for Medical Products*.

*World Health Organization. 2021. The Global Health Observatory: Health and Well-Being.*

Yanti, T. H. dan Farida, Y. 2016, Analisis ABC Dalam Perencanaan Obat Antibiotik Di Rumah Sakit Ortopedi Di Surakarta, *Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research*, 1: 51-57.